

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Strategi penertiban prostitusi di Payo Sigadung melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Sosial, dan DPM-PPA sesuai Perda No. 2 Tahun 2014. Satpol PP sebagai penegak utama, sementara instansi lain menangani keamanan dan pemulihan korban. Pelaksanaannya belum seimbang, terutama dalam sosialisasi yang didominasi Dinas Kesehatan. Warga turut mengawasi dan melapor, namun menilai upaya pemerintah masih sementara dan belum menyentuh akar masalah, karena fokus hanya penindakan.
2. Strategi penertiban prostitusi di Payo Sigadung oleh Satpol PP Kota Jambi mencakup tiga aspek: program, anggaran, dan prosedur. Program meliputi sosialisasi lintas instansi, pengawasan oleh TRC, dan penertiban sesuai SOP, meski belum ada program khusus untuk prostitusi. Anggaran bersifat umum dan dikelola transparan tanpa alokasi khusus. Prosedur berjalan terstruktur dengan dukungan koordinasi antarinstansi dan pelibatan masyarakat. Meski ada tantangan seperti kebocoran informasi dan minimnya teknologi, strategi tetap berjalan berkat fasilitas memadai dan kerjasama yang solid.
3. Manajemen SDM Satpol PP Kota Jambi dalam penanggulangan prostitusi mencakup pengorganisasian, penataan staf, dan pengarahan. Pengorganisasian dilakukan dengan membagi tugas ke bidang-bidang seperti ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta bekerja sama dengan Polri dan instansi lain. Penataan staf mencakup penambahan

personel dengan keahlian khusus seperti penyidik dan intelijen, serta penyesuaian jumlah anggota di lapangan. Pengarahan dari pimpinan dan komunikasi yang baik antar anggota serta dengan masyarakat turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Keberhasilan penertiban prostitusi oleh Satpol PP Kota Jambi dipengaruhi oleh kepemimpinan tegas, komunikasi efisien, dan kerjasama antar lembaga. Pemimpin memberikan arahan jelas dan motivasi, komunikasi baik mendukung sosialisasi dan penindakan, serta kerjasama dengan TNI, Polri, dan Dinas Sosial memperkuat penegakan hukum dan keamanan selama penertiban.
5. Kegagalan strategi penertiban prostitusi Satpol PP Kota Jambi disebabkan bocornya informasi razia sehingga pelanggar sering melarikan diri. Tim Degarda dibentuk untuk memperluas penegakan aturan. Masyarakat berperan penting, namun merasa kurang mendapat dukungan pemerintah, dan menilai penertiban lebih fokus pada penangkapan tanpa mengatasi akar masalah sosial dan ekonomi.

4.2 Saran

1. Selain razia dan penutupan, penting untuk memberikan bantuan jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, terutama korban prostitusi. Ini akan membantu mereka untuk memperbaiki kehidupan dan mengurangi ketergantungan pada prostitusi.
2. Untuk mendukung kelancaran program pemberantasan prostitusi, anggaran yang lebih besar dan tepat sasaran sangat dibutuhkan. Dana yang cukup

akan memastikan program berjalan lancar tanpa terhambat oleh masalah pendanaan.

3. Masyarakat sangat berperan dalam membantu memantau dan melaporkan prostitusi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran mereka lewat edukasi dan penyuluhan agar mereka lebih aktif terlibat dalam upaya penertiban.
4. Walaupun sudah ada kerjasama antara Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Sosial, dan DPM-PPA, koordinasi yang lebih baik dan terintegrasi sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Komunikasi dan kerja sama yang lebih kuat antar lembaga akan mempercepat penanganan masalah prostitusi.
5. Prosedur yang jelas sangat penting dalam penertiban. Namun, juga perlu ada program pendampingan bagi korban prostitusi serta solusi sosial lainnya agar mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.